



**LAPORAN  
KEGIATAN  
2010/2011**

**Oktober – Desember  
2010**

**FOREST GOVERNANCE AND  
MULTISTAKEHOLDER FORESTRY  
PROGRAMME 2007 – 2011**

Cooperation between:



Ministry of  
Forestry

**DFID** Department for  
International  
Development

Service Provider by :



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	1
<b>PENGANTAR</b>	2
<b>Bagian I Pelaksanaan dan Capaian Output Program</b>	3
1.1. Pelaksanaan Program	3
1.2. Capaian <i>Output</i> Program	3
1.3. Persiapan Substansi dan Dokumen Negosiasi VPA	23
<b>Bagian II Financial Management</b>	25
2.1. Realisasi Anggaran dan Perencanaan 2010/2011	25
2.2. Perbaikan Standard Operational Procedures (SOP)	27
<b>Bagian III Kendala, Resiko Dan Penanganan Program</b>	29
3.1. Kendala	29
3.2. Penanganan Kendala	30
<b>Bagian IV Penutup</b>	31
<b>TABEL</b>	
Tabel 1. <i>Statement of Actual Expenditure</i> (In GBP)	25
Tabel 2. Budget September 15, 2010 - September 30, 2011	26

## PENGANTAR

Laporan triwulan MFP II disiapkan sebagai dokumen untuk mencatat dan menyampaikan kemajuan program dan pengelolaan finansial project periode Oktober sampai dengan Desember 2010. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai acuan semua pihak yang berkepentingan, untuk melihat dan mendapatkan dokumen yang dihasilkan MFP II.

Secara keseluruhan kemajuan dalam pelaksanaan MFP II mencerminkan bagaimana dinamika dari jalannya proses dan kemajuan program, terutama kemajuan setelah disepakatinya AWP dan dimulai kerja-kerja untuk menyelesaikan kegiatan pada tahap awal. Dalam periode tiga bulan ini, sebagian fokus pekerjaan yang difasilitasi MFP II adalah memastikan semua kegiatan yang sudah di AWP disiapkan, direncanakan dan dilaksanakan bersama mitra. Pengembangan *Term of Reference* dan proposal program dilakukan bertahap sesuai dengan mekanisme yang sudah ada.

Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan MFP II memperlihatkan bahwa Yayasan KEHATI melakukan terus proses *Quality Assurance* dan *Quality Control* pada pelaksanaan program. Kinerja dari Tim KEHATI yang melaksanakan program terus diupayakan untuk dapat memenuhi capaian program yang disepakati oleh DFID dan Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, dalam periode 2010/2011 PMU juga terus mengembangkan dan melaksanakan sistem Monitoring dan Evaluasi dan implementasinya. Semoga bermanfaat.

**Diah Y. Raharjo**  
**Direktur Program**

## BAGIAN I

### PELAKSANAAN DAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM

#### 1.1. Pelaksanaan Program

Kemajuan program selama 3 (tiga) bulan untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 yang disampaikan dalam laporan ini adalah bagian dari kegiatan MFP II untuk Tahun Anggaran 2010/2011. Pelaksanaan program yang besar dilakukan oleh Tim Program Management Unit (PMU) adalah menyiapkan semua Term of Reference (ToR) dari keseluruhan kegiatan yang ada dalam AWP 2010/2011.

Setelah pembahasan detail dari ToR, Tim PMU banyak melakukan pembahasan bersama mitra untuk penyusunan proposal calon mitra MFP dan proses pengikatan kemitraan melalui skema hibah. Sebagian besar waktu di bulan Desember dihabiskan untuk Proses – Proses Pre PAC dan PAC, fasilitasi penyusunan proposal, harmonisasi aktivitas antar calon mitra, dan finalisasi proposal hibah MFP kepada mitra-mitranya untuk pelaksanaan program.

#### 1.2. Capaian *Output* Program

##### 1.2.1. Capaian Output 1: *Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent monitoring, and licensing and structuring implementation mechanism).*

Pencapaian output I telah mengalami banyak kemajuan dalam kurun waktu 3 bulan. Penyusunan strategi pelaksanaan AWP telah dilaksanakan melalui penyusunan *Term of References* (ToR) beberapa aktivitas yang menjadi acuan bagi mitra untuk menyusun proposal. ToR ini disusun sebagai acuan bagi MFP untuk membangun kerjasama dengan para mitra, yakni target capaian yang diharapkan, metode pelaksanaan program, dan gambaran–gambaran aktivitas yang dapat dilaksanakan. Bekerja dengan dukungan *Technical Assistance*, pada bulan November ini telah diselesaikan 7 TOR sebagai berikut:

- TOR 1, Mempersiapkan lembaga pelatihan SVLK berbasis kompetensi dan calon auditor SVLK yang kompeten;
- TOR 2, Mempersiapkan perguruan tinggi sebagai lembaga diklat SVLK berbasis kompetensi;
- TOR 3, Mendorong kesiapan kelompok usaha kehutanan skala mikro dan kecil dalam implementasi SVLK di Propinsi DIY dan Jawa Tengah;

- TOR 4, Penyiapan pelatih – pendamping UKM Kehutanan di Indonesia dan mendorong kesiapan UKM Kehutanan di Jawa (industri kayu kecil / menengah dan hutan rakyat) dalam implementasi SVLK;
- TOR 5, Mendorong persiapan kelompok usaha mikro dan kecil di Bali dan para pihak pendukungnya dalam implementasi SVLK;
- TOR 6, Mendorong kesiapan institusi birokrasi dan penegak hukum dalam implementasi SVLK;
- TOR 7, Pengembangan Sistem Informasi SVLK.

Setelah dilakukan harmonisasi dan pembahasan ToR dalam PMU, secara khusus Tim Output I langsung berkomunikasi untuk membahas substansi dan rencana pelaksanaan kegiatan dengan calon mitra potensial tentang beberapa kegiatan yang akan menunjang pencapaian output.

Perhatian pada peningkatan kapasitas untuk auditor SVLK disiapkan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu konsultasi dan review ulang substansi kurikulum dan silabus yang baru kepada para widya iswara di Pusdiklat; rangkaian kegiatan *pre-assessment* terhadap lembaga diklat kompetensi yang ada di Indonesia, baik lembaga yang bernaung di bawah Pusat Diklat Kehutanan ataupun perguruan tinggi.

- 1. Diskusi tentang peningkatan kapasitas Industri kecil menengah bersama TFT**  
Untuk memulai tahapan implementasi AWP, Tim Output I mendiskusikan ToR dengan beberapa mitra potensial. Selain untuk menggali masukan dari para pelaku terkait, MFP juga sekaligus menjajaki beberapa institusi untuk menjalin kemitraan. Salah satunya adalah dengan *Tropical Forest Trust* (TFT), yang telah berpengalaman dalam memfasilitasi (mendampingi) industri pengolahan hasil hutan kayu untuk mendapatkan sertifikasi ekolabel dan meraih pasar.

Salah satu hal yang menjadi input dari TFT adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas industri melalui dua skema, yaitu yang pertama pendampingan (latih damping), dan yang ke dua adalah pelatihan. Pelatihan bisa dilakukan untuk industri kecil/ menengah dalam jumlah besar, dan kemudian dipilih beberapa industri untuk dilakukan pendampingan. Sebagai kelanjutan, disepakati juga bahwa MFP akan mendukung atau membiayai proses sertifikasi SVLK beberapa industri kecil di Jawa Tengah atau Jawa Timur.

Hasil diskusi menyepakati akan adanya kerjasama (kemitraan) antara MFP dengan TFT. Namun demikian, disepakati pula bahwa aktivitas yang dilakukan oleh TFT akan dirangkaikan dengan aktivitas penguatan unit manajemen hutan rakyat yang difasilitasi oleh mitra – mitra yang lain di Jawa Tengah.

- 2. *Training of Trainers (ToT) Independent Forest Monitoring (IFM)***  
Aktivitas ini merupakan aktivitas output I untuk mendukung pencapaian output III. Hasil dari pelatihan merupakan langkah awal untuk *Training of*

*Trainers IFM* yang akan dilaksanakan oleh MFP melalui output III MFP. Training diikuti oleh 18 orang peserta dari seluruh Indonesia. Dengan *Lead Trainer* Dr. Agus Setyarso, dibantu oleh Tim MFP II Arbi Valentinus, Endang Setiawan, Agus Affianto, dan Irfan Bakhtiar, training juga menghadirkan narasumber yang kompeten dari Ditjen BUK dan KAN. Selain materi kelas, peserta juga melakukan praktek pemantauan di Hutan Rakyat bersertifikat PHBML yang dikelola Koperasi Wana Manunggal Lestari di Gunung Kidul, dan Industri Jawa Furni Lestari di Klaten dan Yogyakarta.

Setelah melalui 6 hari pelatihan, yang diakhiri dengan *micro teaching* sebagai uji kompetensi trainers, dilakukan penilaian oleh tim trainer dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Sebelas (11) orang peserta memenuhi kualifikasi sebagai **PELATIH**, yaitu Zainuri Hasyim, Rustanto, Anton Sanjaya, Sutono, Wirendro Sumargo, Mardi Minangsari, Exwan Novianto, Suryanto Sadiyo, Paramita Iswari, Ahmad SJA, dan Yuyun Kurniawan.
- 2) Empat (4) orang peserta memenuhi kualifikasi sebagai **ASISTEN PELATIH**, yaitu Abu Meridian, Umi Syamsiatun, Rahmanta Setiahad, dan Asmar Exwar. Peserta dapat memenuhi kualifikasi PELATIH setelah aktif dalam 2 kali program pelatihan sebagai asisten pelatih.
- 3) Dua (2) orang peserta memenuhi kualifikasi sebagai **FASILITATOR PELATIHAN**, yaitu Mei Leandha dan Willem Pattinasarani.
- 4) Satu (1) orang peserta belum memenuhi kualifikasi sebagai Pelatih maupun Fasilitator, dan kuat direkomendasikan untuk mengambil peran aktif sebagai **PEMANTAU**, yaitu Roganda Simanjuntak.

### **3. Diskusi konsultasi Draft Kurikulum dengan tim penyusun kurikulum dan silabus.**

Setelah selesai melakukan revisi dan finalisasi kurikulum dan silabus peningkatan kapasitas versi MFP pada bulan Oktober, pada awal bulan November 2010, MFP kembali berdiskusi dengan tim penyusun kurikulum dari LEI dan Widyaiswara Pusat Diklat Kehutanan. Di dalam diskusi tersebut dibahas dan disepakati antara lain:

- 1) Bangun kurikulum yang diusulkan MFP dianggap sudah sesuai dan memenuhi pencapaian kompetensi yang diharapkan.
- 2) Persyaratan peserta menjadi catatan penting bagi pelaksanaan training. Kemungkinan keragaman latar belakang pendidikan dan tingkat pengalaman peserta training merupakan salah satu titik kritis dari kualitas training itu sendiri.
- 3) Meskipun demikian, persyaratan calon peserta training juga disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- 4) Draft kurikulum dan silabus dianggap telah memenuhi, dan ditugaskan kepada MFP untuk merapikan kembali sebelum menyerahkan draft tersebut kepada kepala Pusdiklat untuk diformalkan.

- 5) Dalam diskusi disepakati adanya *pre-assessment* terhadap lembaga diklat kompetensi yang sudah teridentifikasi, yaitu BDK Pekanbaru, BDK Kadipaten, BDK Makassar, BDK Samarinda, BDK Manokwari, dan Universitas Gadjah Mada (Hutan Pendidikan Wanagama I) sebagai lembaga calon penyelenggara Diklat Auditor SVLK.

#### 4. **Pre-Assessment Lembaga Diklat Kompetensi.**

*Pre – assessment* Lembaga Diklat Kompetensi adalah survey awal tim MFP – Pusdiklat – Kehutanan untuk melihat kesiapan lembaga – lembaga diklat dalam menyelenggarakan training SVLK, terutama Training Auditor. Seperti disampaikan di atas, beberapa BDK dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (Hutan Pendidikan Wanagama I) dianggap potensial untuk menjadi LDK SVLK. Namun demikian di dalam *pre – assessment* tim MFP – Pusdiklat - LEI mencoba beberapa komponen yang dimiliki oleh lembaga diklat tersebut, antara lain:

- 1) Ketersediaan SDM dan kualifikasinya
- 2) Ketersediaan infrastruktur penunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
- 3) Kursil, metode dan mekanisme penyelenggaraan diklat yang telah dilakukan selama ini di masing-masing LDK daerah
- 4) *Unit cost standard* penyelenggaraan diklat untuk masing-masing LDK daerah
- 5) Jenis peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk menjadi LDK SVLK daerah
- 6) Rekomendasi hasil *assesment* untuk masing-masing LDK daerah sebagai calon LDK SVLK

Tujuan dari *pre-assessment*, selain melihat kesiapan melaksanakan training, juga untuk memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas para lembaga diklat. MFP berharap training SVLK, terutama auditor, akan menjadi program yang berkelanjutan, dan tidak hanya kegiatan yang berlangsung selama adanya MFP saja. Karena itu, diperlukan lembaga diklat yang memiliki kemampuan dan kreativitas untuk mengembangkan program pelatihannya. Atau setidaknya lembaga diklat memiliki potensi untuk nantinya dikembangkan bersama – sama dengan fasilitasi MFP, LEI, dan Pusdiklat Kehutanan.

*Pre – assessment* telah dilakukan di BDK Pekanbaru, BDK Kadipaten, dan BDK Makassar. *Pre assessment* ini dilaksanakan oleh tim gabungan dari MFP, Pusdiklat Kehutanan, dan LEI. Hanya pada kunjungan di Pekanbaru perwakilan dari Pusdiklat tidak dapat hadir karena kesalahan komunikasi. Beberapa hal yang didapatkan dari kunjungan ke BDK – BDK tersebut antara lain:

- 1) Ketersediaan SDM: di masing – masing BDK pada umumnya terdapat widya iswara yang membidangi perencanaan dan pemasaran / peredaran hasil hutan. Namun demikian, para widya iswara tersebut pada umumnya

belum memiliki pengetahuan tentang SVLK dan teknik audit. Dengan demikian, ada kebutuhan penting untuk peningkatan kapasitas WI tentang SVLK dan teknik audit. Sebagai tambahan kekuatan, dibutuhkan pengajar tambahan dari BP2HP dan perguruan tinggi setempat untuk memperkuat tim trainer SVLK di daerah.

- 2) Ketersediaan infrastruktur: pada umumnya Balai Diklat Kehutanan memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan sangat memadai untuk pelaksanaan diklat, termasuk diklat SVLK. Catatannya adalah tempat praktek. Khusus untuk BDK Kadipaten, lokasinya yang cukup jauh dari industri pengolahan hasil hutan dan wilayah hutan yang memproduksi akan menimbulkan pembengkakan biaya penyelenggaraan Pelatihan SVLK di Kadipaten. Untuk BDK Makassar dan Pekanbaru, tantangannya adalah menjalin kerjasama dengan unit manajemen (HPH/HTI dan Industri Kehutanan).
- 3) Kursil, metode dan mekanisme penyelenggaraan diklat yang telah dilakukan selama ini di masing-masing LDK daerah: Selama ini kurikulum yang digunakan oleh BDK adalah kurikulum dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Karena itu, hampir semua BDK tidak memiliki pengalaman pengembangan kurikulum.
- 4) *Unit cost standard* penyelenggaraan diklat untuk masing-masing LDK daerah: pada umumnya biaya standar di Balai Diklat Kehutanan tidak terlalu mahal, dan cukup efisien.
- 5) Jenis peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh BDK Pekanbaru, Kadipaten, dan Makassar:
  - (1) Perancangan penyelenggaraan diklat;
  - (2) Pengetahuan tentang SVLK (WI);
  - (3) Pengetahuan tentang audit VLK (WI).

**5. Penyerahan secara resmi draft Kurikulum dan Silabus Pelatihan SVLK kepada Pusediklat dan membangun kesepakatan kerja sama**

Setelah melalui serangkaian revisi dan perbaikan, pada pertengahan bulan Desember 2010, secara resmi draft kurikulum dan silabus pelatihan SVLK diserahkan oleh MFP kepada Pusediklat Kehutanan, melalui Kepala Pusat Diklat. Draft final kurikulum yang diserahkan terdiri atas:

- 1) Kurikulum TOT auditor;
- 2) Kurikulum pelatihan auditor SVLK;
- 3) Kurikulum pelatihan internal auditor (untuk unit manajemen hutan dan industri kehutanan);
- 4) Kurikulum pelatihan pendamping SVLK di hutan rakyat dan industri kecil,
- 5) Kurikulum latih damping hutan rakyat atau CBFM; dan
- 6) Kurikulum latih damping industri kayu rakyat.

Jika mengacu pada Permen 38/2009, sebenarnya yang diwajibkan untuk diakui secara formal keberadaannya oleh Kepala Pusediklat adalah Kurikulum

TOT auditor dan kurikulum pelatihan auditor. Namun demikian, Keberadaan pengakuan (*endorsement*) dari Pusdiklat Kehutanan atas semua kurikulum yang telah disusun akan memperkuat standarisasi sistem peningkatan kapasitas para pihak dalam implementasi SVLK.

Selain menyerahkan draft kurikulum dan silabus yang telah disusun, dilakukan juga diskusi dengan Kepala Pusat Diklat sebagai upaya membangun kesepahaman tentang kelanjutan penetapan kurikulum dan kerjasama antara MFP dan Pusdiklat Kehutanan. Beberapa kesepahaman yang didapatkan antara lain:

- 1) Atas permintaan Kepala Pusdiklat, disepakati bahwa akan dilaksanakan satu kali lagi FGD dengan para pihak yang berkompeten sebelum kurikulum ditetapkan oleh Kapusdiklat dengan Surat Keputusan (SK). Diskusi akan dilaksanakan selambat – lambatnya pada awal Januari 2011.
- 2) Draft Kurikulum yang telah disusun oleh MFP akan disusun ulang oleh Bagian Kurikulum Pusdiklat dengan format baku yang dimiliki oleh Pusat Diklat Kehutanan.
- 3) Secara umum, Kapusdiklat sangat terbuka bekerja sama dengan MFP, dengan catatan Pusat Diklat dan Balai Diklat tidak akan mengelola dana, karena hal tersebut melanggar aturan pengelolaan keuangan negara. MFP diharapkan dapat langsung mengelola anggaran dalam pelaksanaan training – training bersama Pusdiklat dan Balai – Balai Diklat di Daerah.
- 4) Pusdiklat menyambut baik gagasan MFP untuk menyerahkan pengelolaan kegiatan pelatihan auditor kepada Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai mitra yang akan menerima hibah dari MFP, dan melaksanakan pelatihan bersama dengan Pusdiklat dan Balai – Balai Diklat di daerah.
- 5) Untuk penyelenggaraan *Training of Trainers Auditor*, akan dilaksanakan langsung oleh MFP dan Pusdiklat Kehutanan, dan akan dilaksanakan di Pusdiklat Kehutanan, Bogor. ToT disepakati akan dilaksanakan selambat – lambatnya pertengahan Februari, sehingga para trainer dapat mulai bekerja dalam pelatihan auditor mulai akhir Februari atau awal Maret 2011.

#### **6. Pre-Assessment Lembaga Diklat Kompetensi (UGM, BDK Samarinda, dan BDK Manokwari)**

Seperti telah disebutkan dalam laporan bulan sebelumnya, *pre – assessment* Lembaga Diklat Kompetensi adalah survey awal Tim MFP – Pusdiklat Kehutanan – LEI untuk melihat kesiapan lembaga – lembaga diklat dalam menyelenggarakan training SVLK, terutama training auditor. Di dalam *pre – assessment* Tim MFP – Pusdiklat - LEI mencoba beberapa komponen yang dimiliki oleh lembaga diklat tersebut, antara lain:

- 1) Ketersediaan SDM dan kualifikasinya.
- 2) Ketersediaan infrastruktur penunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

- 3) Kursil, metode dan mekanisme penyelenggaraan diklat yang telah dilakukan selama ini di masing-masing LDK daerah.
- 4) *Unit cost standard* penyelenggaraan diklat untuk masing-masing LDK daerah.
- 5) Jenis peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk menjadi LDK SVLK daerah.
- 6) Rekomendasi hasil *assesment* untuk masing-masing LDK daerah sebagai calon LDK SVLK.

*Pre – assesment* dilakukan juga pada di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, dengan lokasi training di Hutan Wanagama I Gunung Kidul. Selain itu, peninjauan juga dilakukan di Universitas Mulawarman, Samarinda. Beberapa hal yang didapatkan dari kunjungan ke UGM dan BDK – BDK tersebut antara lain:

- 1) Ketersediaan SDM: di BDK Samarinda dan BDK Manokwari pada umumnya terdapat Pengajar dan Widya Iswara (WI) yang membidangi perencanaan dan pemasaran/peredaran hasil hutan. Sama dengan di lokasi sebelumnya (Pekanbaru dan Makassar), para WI tersebut pada umumnya belum memiliki pengetahuan tentang SVLK dan teknik audit. Dengan demikian, ada kebutuhan penting untuk peningkatan kapasitas WI tentang SVLK dan teknik audit. Sebagai tambahan kekuatan, dibutuhkan pengajar tambahan dari BP2HP dan perguruan tinggi setempat untuk memperkuat tim trainer SVLK di daerah.
- 2) Untuk BDK Samarinda, beberapa staf pengajar dari Universitas Mulawarman dapat diajak bekerja sama untuk menjadi pelatih. Selain itu, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman juga potensial untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan pelatihan internal auditor bagi HPH/HTI dan industri.
- 3) Ketersediaan infrastruktur: pada umumnya Balai Diklat Kehutanan memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan sangat memadai untuk pelaksanaan Diklat, termasuk diklat SVLK. Catatannya adalah tempat praktek. Untuk BDK Samarinda, misalnya. Keberadaan wilayah HPH yang masih aktif di Kalimantan Timur berada cukup jauh dari Samarinda. Namun demikian, di sekitar BDK Samarinda terdapat beberapa HTI yang beroperasi, lengkap dengan industri pengolahan hasil hutannya.
- 4) Catatan khusus untuk BDK Manokwari, keberadaannya yang jauh hanya memungkinkan bagi keikutsertaan calon auditor dari sekitar Manokwari saja. Biaya transportasi menuju Manokwari akan menjadi kendala bagi calon peserta yang berasal dari luar Manokwari, bahkan dari Jayapura sekalipun.
- 5) Catatan dari Fakultas Kehutanan UGM dan Wanagama: Keberadaan Wanagama di Gunungkidul yang dekat dengan potensi hutan rakyat yang luas, serta lokasi HKm, dan juga adanya kerjasama antara Fakultas Kehutanan UGM dengan beberapa NGO yang memfasilitasi CBFM di Jawa

seperti Java Learning Center membuat Fakultas Kehutanan UGM juga memiliki kemampuan untuk mengadakan pelatihan bagi pendamping SVLK untuk unit manajemen hutan skala kecil (hutan rakyat, HKM, HTR).

- 6) Kursil, metode dan mekanisme penyelenggaraan diklat yang telah dilakukan selama ini di masing-masing LDK daerah: Selama ini kurikulum yang digunakan oleh BDK adalah kurikulum dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Karena itu, hampir semua BDK tidak memiliki pengalaman pengembangan kurikulum. Pengecualian untuk temuan ini adalah di Fakultas Kehutanan UGM, yang merupakan institusi perguruan tinggi.
- 7) *Unit cost standard* penyelenggaraan diklat untuk masing-masing LDK daerah: pada umumnya biaya standar di Balai Diklat Kehutanan tidak terlalu mahal, dan cukup efisien.
- 8) Jenis peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh BDK Samarinda dan BDK Manokwari sama dengan yang kebutuhan BDK Pekanbaru, Kadipaten, dan Makasar:
  - Perancangan penyelenggaraan diklat;
  - Pengetahuan tentang SVLK (WI);
  - Pengetahuan tentang audit VLK (WI).

#### **7. Fasilitas Penyusunan Proposal Mitra dan PAC.**

Setelah pada bulan November 2010 dilaksanakan penyusunan kerangka acuan kegiatan (ToR) sebagai acuan kegiatan mitra untuk mencapai target MFP, pada bulan Desember 2010 tahapan yang dilaksanakan adalah Pre – PAC, fasilitasi penyusunan proposal mitra, dan rapat PAC untuk menilai kelengkapan proposal mitra. Beberapa proposal mitra yang telah disetujui oleh PAC untuk melaksanakan kegiatan di dalam output I adalah:

- 1) Mempersiapkan lembaga pelatihan SVLK berbasis kompetensi dan calon auditor SVLK yang kompeten, Lembaga Ekolabel Indonesia. Aktivitas utama yang akan didukung melalui kemitraan ini adalah:
  - Fasilitasi penetapan standar kompetensi auditor SVLK.
  - Training auditor SVLK untuk 8 angkatan (200 orang) yang akan dilaksanakan di Balai– Balai Diklat Kehutanan yang telah direncanakan.
  - Training internal auditor untuk HPH/HTI, yang akan dilaksanakan di Samarinda, bekerja sama dengan Universitas Mulawarman.
  - Fasilitasi pembentukan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen, yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur, bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- 2) Mempersiapkan Lembaga Diklat SVLK Berbasis Kompetensi melalui Training Auditor dan Pendamping SVLK, yang diusulkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Aktivitas utama yang akan didukung melalui kemitraan ini adalah:
  - Training pendamping SVLK.
  - Training auditor SVLK 4 angkatan (100 orang).

- Fasilitasi inisiasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dengan spesialisasi audit hutan rakyat / HKM.
  - Evaluasi pendampingan SVLK.
- 3) Pengembangan *Learning Site* untuk Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Jawa Tengah dan DIY, yang diusulkan oleh Perhimpunan Shorea, Yogyakarta. Aktivitas utama yang akan didukung melalui proposal ini adalah:
- Pelatihan Tata Usaha Kayu bagi petugas penerbit Surat Keterangan Asal Usul Kayu (aparatur desa) di Gunungkidul dan Kulonprogo (DIY), Blora dan Wonosobo (Jawa Tengah).
  - Latih Damping unit manajemen hutan untuk meningkatkan kapasitas menuju VLK bagi 75 unit manajemen hutan skala kecil di Gunungkidul, Blora, dan Wonosobo.
  - Penyiapan 4 lokasi pilot untuk sertifikasi SVLK di Hutan Rakyat / HKM di Gunungkidul, Blora, dan Wonosobo.
- 4) Latih Damping bagi Fasilitator, Industri Kayu Skala Kecil/Menengah, dan Piloting Implementasi SVLK, yang diusulkan oleh Tropical Forest Trust (TFT). Kegiatan utama yang akan didukung melalui proposal ini adalah:
- Pelatihan bagi fasilitator/pendamping industri kayu skala kecil/menengah.
  - Pelatihan SVLK bagi 75 industri kayu skala kecil dan 20 industri kayu skala menengah.
  - Pendampingan bagi 4 industri skala kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikat VLK.

Empat proposal tersebut telah disetujui oleh PAC untuk didukung, dengan beberapa catatan perbaikan. Sampai dengan akhir bulan Desember 2010, perbaikan terhadap 3 proposal mitra (LEI, UGM, dan Shorea) telah selesai dilakukan, baik perbaikan proposal maupun revisi anggaran. Dengan demikian, kontrak hibah dapat ditandatangani pada awal Januari, yang artinya rangkaian kegiatan bisa dimulai pada awal Januari 2011 pula. Satu proposal yang lain, yang diusulkan oleh TFT, masih tertunda proses perbaikannya.

#### **8. Training SVLK untuk Fasilitator (Pendamping) Jaringan untuk Hutan Sulawesi Tenggara (JAUH Sultra)**

Jaringan Untuk Hutan Sulawesi Tenggara (JAUH Sultra) merupakan mitra MFP yang persetujuan hibahnya telah selesai pada akhir bulan Oktober 2011. Dengan demikian, kegiatan JAUH sudah dimulai pada bulan November 2011. Salah satu kegiatan awal JAUH adalah Training Pendamping SVLK, yang semula dijadwalkan awal November 2011. Namun demikian, akhirnya training ini baru dilaksanakan pada tanggal 15 – 19 Desember 2011.

Training Pendamping dilaksanakan untuk mengisi gap kapasitas fasilitator JAUH tentang SVLK. Menghadirkan beberapa narasumber dari TFT, TNC,

BP2HP, dan MFP II, training ini dapat memberikan tambahan pemahaman yang kuat bagi para fasilitator JAUH tentang SVLK. Sebelumnya, fasilitator JAUH ini telah berpengalaman dalam mendampingi unit manajemen hutan rakyat yang dalam proses sertifikasi ekolabel.

### **1.2.2. Capaian Output 2: *SVLK certified timber recognised in key international markets.***

Selama tiga bulan kegiatan output II telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi proses negosiasi VPA dan promosi SVLK kepada Pemerintah dan pembeli di luar Uni Eropa. Secara detil, laporan kemajuan disampaikan berdasarkan sub-output di bawah.

#### **1. Availability and acceptability of FLEGT-licensed timber in EU market**

##### *Facilitating Joint Experts Meeting (JEM 5 dan JEM 6)*

MFP II telah melakukan persiapan pertemuan JEM 5 dengan melakukan pertemuan parapihak secara terbatas untuk menyiapkan agenda dan dokumen yang akan dibahas dalam pertemuan JEM 5. Persiapan pertemuan JEM5 dihadiri oleh perwakilan para pihak yaitu : TNC, Telapak, Ditjen BUK dan Expert MFP II dan Expert dari Delegasi EU.

Dalam kesempatan persiapan dan penyelenggaraan JEM 5 tersebut, MFP memfasilitasi Tim BUK untuk pembuatan dokumen dengan mengontrak dua tenaga untuk menyiapkan dokumen *Mechanism of Control of Supply Change* dan *Legality Definition*.

Proses pertemuan mulai dari persiapan hingga penyelenggaraan JEM 5 dapat menyelesaikan target persiapan dokumen. Bahkan pihak EU menambahkan ringkasan hasil capaian dalam "*aide at memoar*". Secara umum aktivitas ini mencatat capaian 100% bila dikaitkan dengan hasil akhir yang akan menjadi bagian pengambilan keputusan di TWG5.

Pertemuan JEM 5 dilakukan pada 1-3 November, dimana delegasi Indonesia dalam diskusi 3 hari tersebut berhasil menyelesaikan dokumen-dokumen seperti 1) Final TOR *Periodic Evaluation*, 2) *Legality Definition* of SVLK, 3) *Mechanism of Control of Supply Chain*, 4) *Licensing Scheme*. Dalam pertemuan itu semua dokumen telah disepakati dan setiap lingkup diskusi dituangkan dalam *aide memoar* yang dipersiapkan oleh Tim EU serta dibahas bersama dengan Tim Delegasi RI. Secara keseluruhan pertemuan JEM 5 berhasil menjembatani berbagai perbedaan dan kendala teknis di lapangan yang dituangkan dalam dokumen tersebut di atas.

Dalam rangka menyiapkan JEM 6, MFP telah mensupport rapat persiapan internal pada tanggal 20 Desember, yang menghasilkan agenda pertemuan lanjutan terkait persiapan penyelenggaraan JEM 6.

Beberapa TOR disiapkan untuk berbagai kegiatan seperti persiapan JEM6, pertemuan dengan delegasi EFI, Melissa Othman, penyusunan annex 5 dan 10 dengan menyiapkan expert pool serta diskusi dengan expert Indonesia untuk isu *Reporting and Public Disclosure*.

### Facilitating Negotiation Teams

#### **1) Pertemuan *Digital Video Conference (DVC)*.**

Ditiadakan karena wakil EU telah datang untuk melakukan pertemuan pendahuluan (Pre TWG5) pada 24 November 2010. Namun dalam pertemuan TWG5 direncanakan DVC akan dilakukan pada 22 Desember 2010

#### **2) Persiapan pertemuan TWG 5.**

Ada dua macam pertemuan persiapan TWG 5 yang dilakukan yaitu: MFP II tengah menyiapkan Persiapan TWG 5 yang rencana memfasilitasi tim inti (BUK) untuk menyiapkan dokumen dan agenda pertemuan yang diadakan pada 18-19 November 2010, namun pertemuan persiapan itu sendiri baru terlaksana 22 November yang hanya dihadiri oleh *INA-Co Director* dan *Program Director*. Pertemuan dilanjutkan pada hari berikutnya (23 November) dimana hadir BUK, MFP dan Kemenlu. Peserta yang hadir dari MFP, Ditjen BUK, Biro KLN, dan Kementerian Luar Negeri. Pertemuan tersebut membahas legal text dan posisi dalam negosiasi TWG, serta mereview hasil-hasil yang sudah dicapai dalam JEM 5.

Masih dalam rangka persiapan TWG, dilakukan pertemuan Pre TWG 5 dilakukan pada 24 November yang ditandai dengan hadirnya perwakilan dari EU (tanpa pimpinan Hugo Maria S) untuk memfinalkan dokumen dan agenda. Dalam pertemuan pre TWG 5 ini dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok A untuk pembahasan agenda dan kelompok B menyelesaikan draft *Supply Chain*. Pertemuan ini dipimpin AEN dari MFP dan pihak EU.

#### **3) Pertemuan TWG 5.**

Pertemuan TWG 5 dilakukan pada 25-26 November dengan anggota delegasi Indonesia terdiri dari 9 Staf Kemenhut dan didampingi oleh 7 staf MFP dan 1 mewakili TNC. Para delegasi Indonesia adalah: Agus Sarsito [KLN], Muhamad Firman [BUK], Agus Justianto [BRUPHP], Maidiward [BUK], Jansen Tangketasik [BUK], Nandang Prihadi [BUK], Agus Isnantyo Rahmadi [KLN], Rooslyn [KLN], Agus Saksono [BUPH] dan Tim MFP, dan Gunawan Wicaksono (TNC).

Delegasi EU terdiri dari: Hugo Maria S, Hugh Speechly, Thibout Protevein, Flip Van Helden, Dejan Lewis. Hasil-hasil yang dicapai adalah disepakatinya agenda pertemuan berikutnya atau disebut *road map* yaitu :

- *Digital Video Conference* pada 22 Desember: mendiskusikan TOR *Periodic Evaluation*, TOR *International Market Monitoring* terkait dengan artikel 10. *Video conference* berikutnya dijadwalkan 18 Januari 2011;
- Agenda JEM 6 direncanakan di Bandung 10-14 Januari 2011 yang akan membahas annex V terkait dengan TLAS, annex X tentang report dan hubungan dan keterkaitan antara antara annex V, VI dan VII;
- TWG 6 direncanakan di Brussel (24-25 Januari 2011) dengan agenda: finalisasi annex I, II, III, IV, V, dan VI; pembicaraan awal *legal text* dan mengidentifikasi masalah-2 yang belum tertangani. Pertemuan TWG 6 dilanjutkan dengan mengakhiri kunjungan ke Chattam House pada 27-28 Januari.
- JEM 7 direncanakan di Bandung (7-11 Februari 2011) dengan sejumlah agenda memfinalisasi annex V, VII dan X.
- TWG 7 direncanakan (16-17 Februari 2011) dan masih didiskusikan lebih lanjut. Agenda adalah memfinalkan *legal text* dan seluruh annex. Dimungkinkan pula agenda ini didahului dengan *video conference*;
- Pertemuan persiapan *Senior Official* melalui *video conference* Maret 2011;
- Pertemuan *Senior Official* direncanakan pada 11 April 2011 untuk menyepakati *FLEGT agreement*;
- Diharapkan pada Mei – Juni 2011 sudah dapat berlangsung proses ratifikasi

Capaian secara umum : pertemuan TWG 5 meninggalkan catatan penting, tentang ketidaksiapan delegasi RI, khususnya Kemenhut dalam merespon dukungan dan fasilitasi MFP. Beberapa kali rapat persiapan yang diajukan oleh MFP tidak mendapat respon, bahkan rencana yang sudah dijadwalkan kerap mulur atau bergeser waktunya. Akibatnya, koordinasi dan persiapan dalam pembahasan substansi kurang memadai. Hal itu terlihat pada pertemuan delegasi RI dan EU dimana koordinasi lebih sering terjadi setiap delegasi EU meminta penjelasan, yang akhirnya terpaksa pimpinan rapat meminta koleganya melakukan pertemuan koordinasi pasca TWG.

Pertemuan persiapan yang tidak optimal ini lebih disebabkan oleh ketidaksiapan dan minimnya komitmen anggota Kemenhut, sehingga meski berbagai pertemuan persiapan dilakukan, namun tidak mencapai kondisi “siap” menghadapi perundingan. Secara persentase, fasilitasi MFP ini sudah berhasil menjadwalkan, mengundang dan memfasilitasi pertemuan, namun kesiapan substansi dan koordinasi delegasi Kemenhut relatif tidak cukup siap.

### Pengadaan Piranti *Digital Video Conference*

Terkait dengan keperluan itu MFP II telah melakukan kerjasama dengan Biro KLN untuk memfasilitasi pengadaan alat *Digital Video Conference* yang disiapkan di salah satu ruang pertemuan di lantai enam (6). Peninjauan ruang telah dilakukan bersama staf KLN dan pencarian *vendor* telah dilakukan untuk mengajukan penawaran yaitu PT. Limko Indonesia, PT. Laserindo Karya Utama dan PT Lintas Arta. Konsultan *Vendor* (PT Lintas Artha) telah mengidentifikasi kebutuhan yang akan digunakan untuk menyiapkan komponen yang akan diajukan.

Sejauh ini, setelah melalui berbagai proses diskusi termasuk mendapat input pada rapat manajemen, maka saat ini diputuskan untuk menyewa ruang *conference* pada Vicon 4 Januari, sambil kemudian PMU menyiapkan proses tender pengadaan alat. Sedangkan untuk menjamin ketersediaan jaringan, dapat dilakukan dengan berlangganan.

### Fasilitasi *Special Envoy* untuk Mempromosikan SVLK di *Key EU market*.

#### **1) Kunjungan MFP bersama BUK ke Industri di Surabaya**

MFP dukung anggota Delegasi RI yang akan ke pertemun International di Cancun Mexico dan pertemuan Internasional lainnya, termasuk memfasilitasi pejabat baru eselon 1 dan 2 untuk melakukan peninjauan kesiapan industri mengimplementasikan SVLK ke sejumlah industri di Surabaya. Persiapan kunjungan difasilitasi MFP dengan mengatur agenda para pejabat, menyiapkan TOR dan pendanaan untuk kunjungan pada 3-4 Desember 2010.

Kunjungan yang diikuti oleh Dirjen BUK, UK-Co Director, Program Director dan Tim BUK, juga membawa serta Tim Pembuat Film, dimana pada saat yang dilakukan wawancara dengan mereka sebagai narasumber pada proses pembuatan film.

Beberapa catatan dari kunjungan ini adalah:

- Dari kunjungan ke PT. Panca Wana, jelas dapat dilihat bagaimana implementasi SVLK yang diinisiasi oleh industri langsung. Dalam diskusi dengan Pemilik Perusahaan, mereka melakukan audit SVLK secara sukarela, dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja dari pengelolaan industri mereka.
- Dari kunjungan lapangan ini, dapat dipastikan bahwa SVLK dapat diimplementasikan secara betul oleh unit usaha sebagai bagian dari instrumen mereka untuk memperbaiki manajemen dan memenuhi kepentingan performa mereka dalam legalitas produk mereka.
- Pengusaha atau Pemilik Usaha Industri kayu yang memiliki visi jangka panjang memandang bahwa SVLK adalah kebijakan yang dapat

memperbaiki kinerja industri kehutanan dan memastikan sumber bahan baku mereka dari hutan yang dikelola secara lestari.

## **2) Fasilitasi Retreat Perdagangan Hasil Hutan International di Surabaya**

MFP memfasilitasi sebuah pertemuan yang membahas perdagangan hasil hutan untuk pasar International yang berguna untuk melihat dengan tajam promosi SVLK dan merespon kebutuhan pasar secara efektif. Kegiatan ini mengundang kementerian terkait lainnya seperti Kementerian perdagangan, kementerian perindustrian dan Kementerian Luar Negeri. Staf ahli bidang perdagangan internasional turut dalam kunjungan ke PT Panca Wana Lestari, termasuk dalam 1,5 hari workshop. Selain itu, Dr. Bintang juga di undang untuk memaparkan hasil penelitiannya yang didanai MFP tentang potensi perdagangan kayu legal Indonesia di pasar dunia.

Retreat ini menghasilkan kesepahaman antara Pejabat Kehutanan dan Perdagangan atas:

- Kepentingan untuk duduk bersama membahas kerangka kebijakan perdagangan hasil hutan, yang berkaitan dengan kebijakan SVLK dalam rangka memperbaiki tata kelola dari kehutanan dan perdagangan internasional.
- V-Legal dari SVLK akan digunakan sebagai *entry point* perbaikan dari kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan hasil hutan dan merespon bersama kebutuhan pasar international yang berkaitan dengan legalitas.

## **3) Memfasilitasi Promosi SVLK dalam IFFINA 2011**

Dalam kaitannya dengan rencana ini, persiapan awal dukungan MFP adalah akan menjalin kerjasama dengan asosiasi industri kehutanan yang menjadi mitra pemerintah. Meski telah ada gagasan awal penyelenggaraan (TOR) pertemuan komunitas bisnis kehutanan pada Maret 2011, sesungguhnya persiapan MFP yang sudah dilakukan adalah mencetak undangan sebagai pemberitahuan awal akan dilakukannya agenda pertemuan komunitas bisnis pada Maret nanti. Berbagai persiapan dan pematangan agenda ini antara lain telah dikonsultasikan pada SAM bidang perdagangan internasional dan Kapus KLN pada tanggal 20 dan 21 Desember 2010.

## **2. Acceptability of SVLK-certified timber in key non-EU and domestic markets.**

### Study on current market demands for legal timber markets

Hasil studi sudah didapatkan dari penelitiannya Dr. Bintang Simangunsong dari IPB-Bogor. Paparan hasil studi telah dilakukan pada 20 September 2010. Selama bulan Oktober dilakukan pemaparan hasil akhir (sebelum final dan lanjutan dari pemaparan sebelumnya di Santika Jakarta) untuk konsultasi

untuk perbaikan, dihadapan PMU MFP. Hasil studi disimpulkan adalah bahwa kayu Indonesia diserap lebih banyak di kawasan Asia dibanding Eropa. Pasar potensinya tahun mendatang adalah China, Arab dan kawasan Asia.

Studi permintaan pasar kayu telah diselesaikan oleh konsultan Dr. Bintang S. Pasca diskusi final pada Oktober 2010 di MFP. Sebagai tindak lanjut saat ini tengah dilakukan komunikasi perbaikan dan kelengkapan dokumen untuk tujuan percetakan dan perbanyakan. Sebagai masukan akhir sebelum percetakan, Dr. Bintang diundang memaparkan hasil penelitiannya di hadapan peserta rapat retreat perdagangan internasional 29 Desember di Surabaya.

#### Fasilitasi Pengembangan kerjasama perdagangan kayu legal dengan US, Japan and China.

Salah satu bentuk pengembangan kerjasama adalah mengikuti pameran Shiga Enviro di Nagahama. Persiapan Materi Promosi Shiga Enviro 2010 tahap akhir yang melibatkan kontribusi PMU dan konsultan VPA dalam menyepakati substansi materi pameran. Proses penyelesaian kontrak, penyepakatan anggaran hingga persetujuan substansi materi dilakukan pada 6 Oktober, ditandai dengan mulai diproduksi materi pameran.

Seluruh persiapan yang melibatkan peran aktif PMU dianggap cukup berhasil. Kerjasama dengan ITPC Osaka, dan Kedutaan Besar RI di Tokyo sangat berperan dalam hal komunikasi dan menyiapkan tenaga pameran untuk mendukung promosi SVLK.

Pameran di Shiga Expo sendiri cukup sukses, dinilai dari jumlah peserta pameran yang terjaring selama 3 hari mencapai 300 orang, dan beberapa lembaga terkait exportir, lembaga konsultan manajemen di Jepang cukup antusias dengan materi SVLK yang disediakan MFPII dalam pameran. Namun sayangnya pameran Shiga tersebut memiliki tema khusus teknologi lingkungan, sehingga tidak secara langsung berhubungan dengan forum pasar kayu.

### **3. Briefing notes hasil-hasil studi**

Sejauh ini persiapan pengembangan *briefing notes* dan hasil-hasil studi belum dilakukan, namun telah diagendakan untuk penyiapan materi untuk delegasi RI ke Brussel dan Chatam House, diantaranya penyiapan brosur dan *banner* khusus untuk promosi SVLK di pasar EU. Selain untuk kepentingan itu, perbanyakan dua studi yang didukung MFP, yaitu analisa *legal text* dan *demand legal timber market* tengah diproses dalam *layout*.

#### **4. Pembuatan film dokumenter SVLK**

MFP tengah mempersiapkan materi berupa pembuatan film dokumenter tentang skema SVLK untuk mendukung tim delegasi Indonesia menghadiri JLIRA *conference* di Jepang pada Desember 2010 dan keperluan promosi ke pasar internasional lainnya. Namun karena keterbatasan waktu, agenda penayangan film dokumenter ini ditargetkan pada acara Retreat Perdagangan Internasional 29 Desember 2010 di Surabaya.

Berdasarkan pertemuan teknis yang difasilitasi MFP, substansi pembuatan dokumenter tengah disiapkan oleh agensi terpilih pada 14 November 2010, yaitu Matoa Albarits. Untuk kepentingan yang lebih luas memperlihatkan kesiapan berbagai pihak dalam implementasi SVLK, pembuatan film dokumenter ini akan juga mengambil gambar training IFM untuk CSO dilakukan di Solo November-Desember 2010, Kunjungan ke industri 3-4 Desember, FDG kelembagaan *conflict resolution* atas SVLK pada 15 Desember di Jakarta.

Penayangan awal film dokumenter ini dilakukan pada 23 Desember 2010 di kantor MFP utk mendapat masukan. Disepakati dilakukan perbaikan dan pengemasan utk keperluan pertemuan Retreat Perdagangan hasil hutan pada 28 Desember di Surabaya.

#### **5. Fasilitas promosi SVLK sebagai *procurement policy* di dalam negeri.**

Pada tahap ini telah dimulai pengembangan TOR untuk ditawarkan pada lembaga mitra yang kompeten. TOR untuk Studi dan advokasi pengembangan kebijakan kayu legal sebagai *procurement policy* di birokrasi pemerintah ini tengah digodog untuk mendapat masukan secara internal. Sementara itu penjajagan dengan lembaga calon mitra seperti IWGFF sudah dilakukan pada 28 Desember dan sepakat untuk melakukan diskusi pada Januari 2011.

#### **1.2.3. Capaian Output 3: *Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation.***

Dalam periode tiga bulan ini, capaian output 3 adalah pada mempersiapkan jaringan masyarakat sipil (CSOs) untuk terlibat aktif dalam implementasi SVLK. Pelaksanaan program ini lebih terfokus pada memfasilitasi kesiapan lembaga dan kapasitas CSO dan forum multipihak untuk terlibat dalam pemantauan atas implementasi SVLK (melakukan IFM di daerah) melalui :

- Memfasilitasi berfungsi dan berperannya jejaring kerja Pemantau Independen seperti Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/Kelompok Pemantau Legalitas Kayu dalam rangka pemantauan atas implementasi SVLK.
- Melakukan studi dan kajian pengembangan mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan terkait implementasi SVLK.

- Pelatihan *Independent Forest Monitoring* bagi CSO dan memfasilitasi implementasi pemantauannya melalui *Community Foundation* di Sumatera dan Sulawesi serta dokumentasi proses dan pengelolaan pembelajaran.

Beberapa yang telah dikerjakan dan disiapkan adalah:

**1. Penguatan Tata Kelembagaan Resolusi Keberatan atas Implementasi Sistem VLK/PK-PHPL, serta Pelaksanaan Pilot Resolusi Keberatan.**

Rangkaian kegiatan dalam kerangka Kajian untuk Membangun Model Kelembagaan Penyelesaian Keberatan telah diselesaikan pada 15 Desember 2010 dengan pelaksanaan diskusi kelompok terbatas (FGD) untuk memperoleh pandangan dari berbagai pihak terhadap temuan atas simulasi lapangan terhadap penilaian atas PT. Telaga Mas, Paser, Kaltim dan PT. Toba Pulp Lestari, Sumatera Utara. *Outcome* untuk menjadikan SVLK dapat bekerja secara sempurna sehingga tata-kelola kehutanan yang baik (*good forestry governance*) menuju pengelolaan hutan lestari dapat diwujudkan semaksimal mungkin melalui bangun model kelembagaan penyelesaian keberatan yang dapat diimplementasikan dengan optimum.

Kelanjutan atas kegiatan ini adalah Penguatan Kelembagaan Penyelesaian Keberatan atas Implementasi Penilaian Kinerja PHPL dan VLK. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi formulasi penguatan pengaturan kelembagaan resolusi keberatan, serta persiapan pelaksanaan pilot resolusi keberatan (termasuk ke dalamnya peningkatan kapasitas/*coaching*) terkait mekanisme keberatan atas implementasi sistem VLK/PK-PHPL di 5 (lima) region yang menjadi prioritas/fokus pelaksanaan pemantauan implementasi VLK/PK-PHPL.

Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk mencapai output III melalui kegiatan yang sudah direncanakan dalam AWP 2010/2011 pada kegiatan: 3.2.2 '*Facilitating the formulation of institutional arrangement for dispute resolution on complain mechanism of SVLK*' dan 3.2.3 '*Facilitating monitoring and pilot test of dispute resolution on complaint mechanism of SVLK*'.

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan keluaran berupa rumusan penguatan/penyempurnaan mekanisme penyampaian dan penanganan keberatan dari elemen BUK, KAN, LP&VI, dan pemantau independen (*review of complaints mechanism facilitated and publicly disseminated*), serta pembelajaran dari hasil pilot resolusi keberatan (*the lessons learned of VLK/PK-PHPL dispute resolution produced*).

Secara umum, aktivitas ini bermanfaat untuk perbaikan mekanisme keberatan guna penguatan jaminan akuntabilitas implementasi VLK/PK-PHPL. Secara khusus, aktivitas ini bermanfaat untuk:

- Peningkatan kapasitas pemantau independen dalam kerja-kerja pemantauan implementasi VLK/PK-PHPL, khususnya terkait penyampaian/pengajuan laporan keberatan dan pemantauan atas tindak lanjut atas keberatan yang telah diajukan tersebut.
- Penguatan/penyempurnaan tata laksana kelembagaan penyelesaian keberatan yang terbuka serta operasional guna menjamin kredibilitas sistem (penyempurnaan aturan implementasi sistem VLK/PK-PHPL), baik dalam bentuk ketentuan/peraturan pada Kementerian Kehutanan cq. BUK, KAN, serta pada LP&VI.

## **2. Pengembangan Jejaring Pemantauan Independen.**

MFP telah berhasil mendorong terbentuknya Kelompok Pemantau Legalitas Kayu (KPLK) pada periode 2009, dimana tergabung di dalamnya TNC, Telapak, dan TII. Dalam periode ini, MFP II telah memfasilitasi berfungsi dan berperannya jejaring pemantauan yang lebih luas dalam Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) serta terbentuknya Aliansi Pemantau Independen Sumatera (APIKS) pada 22 Desember 2010. Pengembangan jejaring pemantauan independen ini sebagai wujud dari komitmen dan peran CSO untuk ikut memastikan kredibilitas sistem PK-PHPL dan VLK.

Kelanjutan dari fasilitasi berfungsi dan berperannya Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dituangkan dalam kegiatan Penguatan Pemantau Independen, serta Pelaksanaan Pemantauan Implementasi Sistem VLK/PK-PHPL.

## **3. Penguatan Pemantau Independen, serta Pelaksanaan Pemantauan Implementasi Sistem VLK/PK-PHPL, dan Review Sistem serta Kebijakan Terkait.**

Dalam periode ini, telah dilaksanakan kegiatan Workshop “Merumuskan Posisi dan Rencana Aksi Masyarakat Sipil Sumatera dalam Implementasi PHPL dan SVLK” di Jambi pada tanggal 21-22 Desember 2010 yang selain menyepakati terbentuknya Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera, juga menghasilkan kesepakatan agenda/rencana aksi jangka pendek (peningkatan kapasitas, uji coba pemantauan, pengembangan sistem data/informasi) serta agenda penguatan/dinamisasi aliansi untuk pencapaian target jangka panjang. Sejalan dengan ini, kegiatan pelatihan bagi pelatih (ToT) pemantau independen guna menyiapkan fasilitator pelatihan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi pemantau independen dengan standar kualitas pelatihan yang mencukupi juga telah dilaksanakan sebagai bagian dari Output I MFP II pada 29 November – 4 Desember 2010 yang diikuti oleh 18 peserta dari jejaring pemantau yang berasal dari berbagai daerah.

Kelanjutan dari telah tersedianya fasilitator pelatihan pemantau adalah kegiatan Penguatan Pemantau Independen, serta Pelaksanaan Pemantauan Implementasi Sistem VLK/PK-PHPL, dan Review Sistem serta Kebijakan Terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas, termasuk kelembagaan-pemantau independen terkait implementasi sistem VLK/PK-PHPL di 12 (dua belas) propinsi, penguatan manajemen data/informasi, prioritas/fokus pelaksanaan pemantauan implementasi VLK/PK-PHPL di 5 (lima) region, serta pelaksanaan/pengawasan atas review sistem dan kebijakan terkait.

Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk mencapai Output III melalui kegiatan yang sudah direncanakan dalam AWP 2010/2011 pada kegiatan: 3.3 '*Independent performance review process to improve standards and implementation of Permenhut 38/2009 developed, implemented and results publicly accessible*', serta 3.4 '*Awareness of key interest groups on aims and operation of SVLK*'.

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. *Training for independent forest monitoring* untuk 12 provinsi melalui fasilitasi jejaring CSOs.
2. *Monitoring in 5 regions conducted.*
3. *Network group meetings to review system conducted.*
4. *Final report of the review of Permenhut 38/2009 performed and disseminated.*
5. *Pooling knowledge of key CSOs at central level conducted, and channeling of the socialisation strategies into regional CSO networks is facilitated in 33 provinces and 81 districts.*

Secara umum, aktivitas ini bermanfaat untuk penguatan peran pemantauan sebagai jaminan akuntabilitas implementasi VLK/PK-PHPL. Secara khusus, aktivitas ini bermanfaat untuk:

- 1) Peningkatan kapasitas pemantau independen serta penguatan kelembagaan dalam kerja-kerja pemantauan implementasi VLK/PK-PHPL, termasuk juga keberadaan code of conduct/working standards dan strategi pendanaan.
- 2) Penguatan sistem VLK/PK-PHPLK serta kebijakan yang terkait.

Secara keseluruhan, kemajuan program yang terlihat adalah pada pelaksanaan peningkatan kapasitas untuk implementasi SVLK. Dimana pelaksanaan training auditor SVLK di lembaga – lembaga diklat di daerah merupakan salah satu komitmen MFP untuk meningkatkan efisiensi implementasi sistem verifikasi dan legalitas kayu. Dengan adanya pelatihan auditor SVLK di berbagai daerah, diharapkan akan tersedia *pool of VLK auditor* di daerah, dekat dengan lokasi pengelolaan hutan atau industri kehutanan. Dengan demikian, diharapkan auditor yang tersedia ini akan dimanfaatkan oleh LPVI untuk

melakukan penilaian terhadap unit manajemen hutan atau industri pengolahan hasil hutan.

*Pre – assessment* lembaga diklat kehutanan di daerah merupakan langkah awal untuk bagi persiapan pelatihan auditor SVLK di daerah. Kebutuhan untuk menyiapkan sistem peningkatan kapasitas SVLK sebagai sesuatu yang sistematis dalam jangka panjang merupakan alasan yang mendasari proses *pre – assessment* ini. Dengan proses ini, diharapkan dapat teridentifikasi kebutuhan LDK di daerah untuk menjadi lembaga diklat kompetensi yang memasukkan training SVLK sebagai salah satu programnya.

Seperti telah disepakati dalam metode pelaksanaan program MFP, mekanisme hibah kepada mitra kerja merupakan salah satu mekanisme penting yang digunakan MFP dalam mencapai targetnya. Kerangka Acuan Kerja, atau *Term of Reference* (ToR), merupakan acuan bagi mitra kerja untuk menyusun rencana aktivitasnya. ToR ini sendiri merupakan alat bagi MFP untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang didukungnya dapat menjawab AWP dan mencapai milestone yang ditargetkan. Meskipun ToR ini merupakan bagian penting dari implementasi program, namun demikian belum dapat dikatakan bahwa aktivitas ini berkontribusi besar kepada pencapaian *milestone*. Untuk masing-masing *milestone*, penyusunan ToR ini berkontribusi sekitar 5%. Kontribusi lebih besar akan diberikan ToR ini ketika ToR sudah disetujui oleh Pre – PAC, proposal telah disusun oleh mitra, dan disetujui oleh PAC, serta kontrak kerja dengan mitra telah ditandatangani.

*Training of Trainers* untuk *Independent Forest Monitoring* merupakan aktivitas di dalam Output 1 yang terangkai dengan aktivitas di Output III, yaitu pemantauan SVLK. ToT IFM ini penting, karena ToT ini menyediakan tenaga pengajar yang akan memberikan peningkatan kapasitas bagi pegiat NGO di daerah yang akan melaksanakan pemantauan terhadap implementasi SVLK di daerah. Karena itu, kontribusi ToT ini cukup penting bagi pencapaian *milestone* terkait pemantauan SVLK.

Dalam hal penyusunan kurikulum peningkatan kapasitas SVLK, langkah yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2010 ini setidaknya sudah mendekatkan proses ini pada titik akhir, yaitu dengan memasukkan kurikulum ini ke dalam sistem yang berlaku di Pusat Diklat Kehutanan. Dengan demikian, meskipun mesti melalui satu proses lagi, formalisasi kurikulum SVLK yang telah disusun oleh MFP menjadi semakin dekat. Ini dapat menjadi modal yang sangat penting bagi rangkaian aktivitas selanjutnya.

Di sisi yang lain, penyelesaian rencana kerja sama dengan mitra kerja merupakan langkah yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian *milestone*. Sebagai program yang mengandalkan mekanisme hibah dalam pelaksanaan kegiatannya, terselesaikannya 3 proposal kegiatan setelah berjalannya satu kegiatan mitra (JAUH) merupakan langkah signifikan.

### **1.3. Persiapan Substansi dan Dokumen Negosiasi VPA**

Dalam periode tiga bulan, MFP II telah memfasilitasi persiapan substansi dan dokumen negosiasi VPA sangat ketat dilakukan MFP II. Persiapan baik fasilitasi proses dan pemahaman substansi dari ke dua belah pihak (Komisi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia) dilakukan bersama dengan Dirjen BPK, KLN Kementerian Kehutanan dan Kementerian Luar Negeri. Perhatian dan keseriusan Pemerintah Indonesia merupakan momentum yang menjadi kerja-kerja fasilitasi MFP yang ketat. Rangkaian kegiatan yang merupakan proses adalah sebagai berikut :

#### **1. *Focused Group Discussion (FGD) for Industry***

FGD ini dilakukan untuk mengeksplorasi harapan dari kalangan industri terhadap implementasi SVLK. Hal ini menjadi penting untuk mendapat perspektif pada pelaku industri terhadap kebijakan SVLK. Dalam diskusi ini juga dilakukan pemetaan faktor pendorong & hambatan implementasi SVLK bagi kalangan industri, dan penguatan kebijakan pemerintah yang diperlukan.

Catatan penting hasil diskusi adalah perhatian dari kalangan industri : keseriusan pemerintah dalam mempromosikan SVLK sehingga berdampak positif bagi keberterimaan pasar internasional terhadap SVLK. Sehingga diperlukan pelaksanaan peningkatan kapasitas terutama bagi industri mikro kecil, dan menengah dalam merespons kebijakan pemerintah dan persyaratan pasar internasional.

Dari FGD ini disepakati bahwa diperlukan langkah untuk mengidentifikasi sumberdaya (dana dan keahlian) untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas terhadap industri mikro, kecil dan menengah seluas-luasnya di sentra-sentra industri strategis. Juga diperlukan pelaksanaan peningkatan kapasitas terhadap industri mikro, kecil dan menengah seluas-luasnya di sentra-sentra industri strategis

#### **2. Meeting Persiapan JEM 5, Manggala Wanabakti, 26 Oktober 2010**

Persiapan ini difokuskan untuk mempersiapkan JEM 5 terkait posisi Indonesia dalam hal : *Periodic Evaluation* dan *Licensing Scheme*, yakni untuk merangkum beberapa usulan opsi dalam dalam matriks yang menghubungkan antara opsi, implikasi terhadap peraturan yang ada, serta kelebihan & kekurangan masing-masing opsi. Usulan opsi skema lisensi / *endorsement* beserta implikasi hukum terhadap beberapa peraturan di Kemenhut dan Kemendag yang ada saat ini untuk masing-masing opsi dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya terpetakan. Keputusan terhadap opsi yang dipilih akan menjadi dasar pembahasan dalam JEM 5 dan draft TOR PE relative tidak ada masalah mendasar.

### **3. Joint Expert Meeting (JEM) 5**

JEM 5 difokuskan pada pembahasan draft TOR *Periodic Evaluation* dan pembahasan draft Annex V VPA tentang *Control of Supply Chain*.

Catatan penting dalam JEM ini adalah adanya kesepakatan untuk kedua tim ahli dari EU dan Indonesia menyamakan pemahaman terhadap implementasi *control of supply chain* yang telah dan sedang dilaksanakan Indonesia baik SIPUHH *online* maupun *paper based*, serta mendiskusikan draft TOR PE.

Hasil dari JEM 5 adalah *Final Draft* TOR PE selesai dan *Final Draft Control of Supply Chain*, dan Tim telah memindahkan *final draft* TOR PE dan *control of supply chain* kedalam struktur Annex VPA. Hasil keseluruhan ada pada lampiran.

### **4. Technical Working Group (TWG) 5**

Agenda TWG 5 ini adalah mengkonfirmasi & menyimpulkan : *Control of Supply Chain*, *TOR Periodic Evaluation*, *Legality Definition* dan *Licensing Scheme*. Hasil dari TGW ini dapat disampaikan adalah

- Secara prinsip uraian tentang *Control of Supply Chain* akan disederhanakan untuk memberi fleksibilitas terhadap perbaikan aturan tentang administrasi perkayuan kedepan.
- Tentang *Licensing Scheme* sama sekali belum bisa disimpulkan, karena masih diperlukan pembahasan inter-departemen dan keputusan pengambil kebijakan di internal Indonesia.
- Kesepakatan untuk JEM 6 memfinalisasi Annex IV, V, VI dan keterkaitan diantara ketiganya

## BAGIAN II FINANCIAL MANAGEMENT

### 2.1. Realisasi Anggaran dan Perencanaan 2010/2011

Kegiatan MFP II selama periode Oktober – Desember 2010 telah menyerap dana sebesar GBP 2.621.220. Jumlah ini berarti 87.37% dari anggaran yang direncanakan selama 2 periode 2008/2011 yaitu berdasarkan *Accountable Grant* phase pertama untuk Yayasan Kehati yaitu GBP 3.000.000. Adapun rincian pengeluaran selama periode tersebut sebagai berikut:

#### STATEMENT OF ACTUAL EXPENDITURE (in GBP)

Code	Items	Agreed Budget in GBP	Prior Expenditure	Expenditures October - December 2010	Total Expenditure to date
<b>A</b>	<b>PROGRAM COST</b>				
<b>1</b>	<b>Output Activities</b>				
A.1.1	Output 1	722,500	315,721	414,232	729,953
A.1.2	Output 2	674,286	219,733	38,593	258,326
A.1.3	Output 3	633,571	368,282	357,101	725,383
	<b>Sub Total A.1.</b>	<b>2,030,357</b>	<b>903,736</b>	<b>809,925</b>	<b>1,713,661</b>
<b>2</b>	<b>Program Facilitation</b>				
A.2.1	Strategic planning, meeting and conference	91,929	64,498	11,016	75,514
A.2.2	Provision of operational, thematic, and technical expertise	155,832	177,405	11,618	189,023
A.2.3	Monitoring and evaluation	127,571	33,390	12,347	45,737
A.2.4	Documentation and information dissemination	29,714	16,864	192	17,056
	<b>Sub Total A.2.</b>	<b>405,046</b>	<b>292,157</b>	<b>35,174</b>	<b>327,331</b>
<b>3</b>	<b>Personnel Program</b>				
A.3.1	Program Facilitators	89,650	113,253	14,598	127,851
A.3.2	Co-Director Deput	42,343	3,863		3,863
A.3.3	MoF secondees	66,393	99,790	11,860	111,650
A.3.4	Local FLEGT - VPA consultant	30,179	21,391		21,391
A.3.5	Personnel Development	17,857			
	<b>Sub Total A.3.</b>	<b>246,422</b>	<b>238,299</b>	<b>26,458</b>	<b>264,755</b>
	<b>Sub Total A.</b>	<b>2,681,825</b>	<b>1,434,191</b>	<b>871,557</b>	<b>2,305,747</b>
<b>B</b>	<b>OPERATIONAL COST</b>				
<b>1</b>	<b>Program Operation</b>				
B.1.1	Office space and facilities	20,357	35,212	4,229	39,441
B.1.2	Office equipment	4,643	17,610	1,699	19,309
B.1.3	Server and IT System	1,714	6,173		6,173
B.1.4	Office supplies	3,429	12,046	1,460	13,506
B.1.5	Communication	5,657	11,480	1,840	13,320
B.1.6	Local transportation	20,914	3,609	532	4,141
B.1.7	Audits	21,429	7,699	1,445	9,144
	<b>Sub Total B.1.</b>	<b>78,143</b>	<b>93,830</b>	<b>11,205</b>	<b>105,034</b>
<b>2</b>	<b>Personnel</b>				
B.3.1	Program Director	52,196	67,671	2,807	70,478
B.3.2	Finance Manager	30,908	18,413	10,527	28,940
B.3.3	Administration staff	38,381	58,771	2,211	60,982
B.3.4	Other support staff	2,597	6,179	9,672	15,851
B.3.5	Staff Development	28,571		681	681
	<b>Sub Total B.3.</b>	<b>152,653</b>	<b>151,033</b>	<b>25,898</b>	<b>176,931</b>
<b>3</b>	<b>Institutional Fee (3%)</b>	<b>87,379</b>	<b>29,294</b>	<b>33,506</b>	<b>62,800</b>
	<b>Sub Total B</b>	<b>318,175</b>	<b>274,157</b>	<b>70,610</b>	<b>344,766</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,708,348</b>	<b>942,166</b>	<b>2,650,514</b>
	<b>AUDIT ADJUSTMENT</b>		<b>29,294</b>		<b>29,294</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,679,054</b>	<b>942,166</b>	<b>2,621,220</b>

Sesuai dengan adanya amandemen *Accountable Grant* untuk Yayasan Kehati oleh DFID, maka telah dilakukan perencanaan penggunaan Anggaran MFP II untuk periode bulan September 2010 – September 2011, sebesar GBP 3 Juta. Rancangan anggaran di bawah memperlihatkan bahwa 89.4 % dana dialokasikan untuk Dana Pelaksanaan Program, yang terdiri dari Pelaksanaan Program melalui pemberian *grant* kepada mitra sebesar 67.7 %; Fasilitas Program sebesar 13.5%; dan *Personel Program* sebesar 8.2%. Sisanya sebesar 10, 6 % dialokasikan untuk Biasa Pengelolaan sebesar 7.6 % dan Fee Kelembagaan (Yayasan KEHATI) sebesar 3 %.

### Budget September 15, 2010 - September 30, 2011

No	Components	Total (GBP)	%
<b>A. PROGRAM COST</b>			
<b>1. Grant Making</b>			
1.1	Output 1. Sufficient Capacity to Implement SVLK (Supply Chain Control, Accreditation Processing, Auditing, Independent Monitoring, Licensing and Structuring Implementation Mechanism)	722,500	24.1%
1.2	Output 2. SVLK Certified Timber Recognised in Key Markets	674,286	22.5%
1.3	Output 3. Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK imple.	633,571	21.1%
<b>Sub Total A.1.</b>		<b>2,030,357</b>	<b>67.7%</b>
<b>2. Facilitation</b>			
2.1	Strategic Planning, Meeting and Conference	91,929	3.1%
2.2	Provision of operational, thematic, and technical expertise	155,832	5.2%
2.3	Monitoring and evaluation (field visit, external evaluation)	127,571	4.3%
2.4	Documentation and information dissemination	29,714	1.0%
<b>Sub Total A.2.</b>		<b>405,046</b>	<b>13.5%</b>
<b>3. Personnel Program</b>			
3.1.	Program Facilitators	89,650	3.0%
3.2.	Co-Director Dephut	42,343	1.4%
3.3.	MoF secondees	66,393	2.2%
3.4.	Local FLEGT - VPA consultant	30,179	1.0%
3.5.	Personnel Development	17,857	0.6%
<b>Sub Total A.3.</b>		<b>246,422</b>	<b>8.2%</b>
<b>TOTAL A. PROGRAM COST</b>		<b>2,681,825</b>	<b>89.4%</b>
<b>B. MANAGEMENT COST</b>			
<b>1. Program Operation</b>			
1.1.	Office space and facilities	20,357	0.7%
1.2.	Office equipment	4,643	0.2%
1.3.	Server and IT System	1,714	0.1%
1.4.	Office supplies	3,429	0.1%
1.5.	Communication	5,657	0.2%
1.6.	Local transportation	20,914	0.7%
1.7.	Audits	21,429	0.7%
<b>Sub Total B.1.</b>		<b>78,143</b>	<b>2.6%</b>
<b>2. Personnel Management</b>			
2.1.	Program Director	52,196	1.7%
2.2.	Finance Manager and Finance Supervisor	30,908	1.0%
2.3.	Administration staff	38,381	1.3%
2.4.	Other support staff	2,597	0.1%
2.5.	Staff Development	28,571	1.0%
<b>Sub Total B.2.</b>		<b>152,653</b>	<b>5.1%</b>
<b>3. Institutional Fee</b>			
		<b>87,379</b>	<b>3.0%</b>
<b>TOTAL B. MANAGEMEN COST</b>		<b>318,175</b>	<b>10.6%</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>		<b>3,000,000</b>	<b>100.0%</b>

## 2.2. Perbaikan *Standard Operational Procedures* (SOP)

Mendasari beberapa catatan hasil Auditor pada pengelolaan anggaran, PMU telah melakukan pembahasan dan perbaikan SOP sebagai bagian dari proses pengelolaan anggaran yang bertanggung-jawab. Seperti dalam pengelolaan anggaran, Yayasan KEHATI sebagai *Service Provider*, memiliki empat Prinsip Pengelolaan Penggunaan Anggaran, yaitu (1) *Allocable*; (2) *Allowable*; (3) *Accountable*; dan (4) *Reasonable*.

Prinsip-prinsip tersebut juga akan menjadi prinsip yang ditanamkan pada mitra dan PMU secara benar, dengan penjabaran dan ukuran ketepatan dalam pengelolaan *financial*, yakni:

- 1) ***Allocable* (teralokasi).** PMU akan memastikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana telah memenuhi daftar periksaan (*check list*): Jelas Pos Anggarannya; Jelas Tujuan Penggunaannya dan Jelas Besarannya.
- 2) ***Allowable* (dapat diterima).** PMU akan memastikan pengelolaan dana akan selalu dilihat apakah perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut tidak dilarang (seperti konsumsi alkohol); tidak berbahaya; tidak merusak Lingkungan (seperti penggunaan kertas yang berasal dari pengelolaan hutan yang tidak lestari); dan tidak boleh menggunakan barang bekas (*second*).
- 3) ***Accountable* (bertanggung-jawab).** PMU akan memastikan semua pelaksanaan penggunaan anggaran yang jelas prosedurnya; jelas penanggungjawabnya; dan tercatat dengan baik.
- 4) ***Reasonable* (beralasan).** PMU juga akan memastikan penggunaan dana yang juga bersaing atau murah (melalui mekanisme bidding terbatas untuk jumlah di atas 5 juta rupiah); bermanfaat dan Tepat Guna; serta mudah didapat.

Ke empat prinsip di atas akan selalu menjadi landasan dalam pengelolaan dana, dan tertuang dalam SOP secara jelas. Sehingga pengelolaan dana MFP II dalam dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Indonesia (c/q Kementerian Kehutanan), Pemerintah UK (c/q DFID) dan kepada seluruh pihak dan mitra. Oleh karena itu, pelaporan narasi program dan *financial* akan selalu terbaru di web MFP II.

Kemudian karena adanya kebutuhan internal dan mitra MFP atas prosedur dan standar baku minimum SOP, maka pada tanggal 5 Oktober 2010 dan finalisasi tanggal 4-5 Desember 2010, bersama tim MFP dan Kehati beberapa perubahan sudah dilakukan dan sudah disetujui oleh DFID seperti:

- (1) Honor Narasumber/Pembahas, Pembicara, Moderator, Notulen Rapat sudah disesuaikan dengan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Lingkup Departemen Kehutanan.
- (2) Transportasi dan perdiem Internal MFP. Per diem rate berubah dari Rp 250.000 menjadi Rp 300.000 per hari per orang dan di hitung berdasarkan waktu

- berangkat dan waktu pulang. Perhitungan waktu di bagi dalam 4 (empat) Quarter day's hours yaitu:
- a. Pukul: 00.00 - 06.00 → per diem dihitung 4/4 kali rate per diem
  - b. Pukul: 06.00 – 12.00 → per diem dihitung 3/4 kali rate per diem
  - c. Pukul: 12.00 – 18.00 → per diem dihitung 2/4 kali rate per diem
  - d. Pukul: 18.00 – 24.00 → per diem dihitung 1/4 kali rate per diem.
- (3) Lokal transport dari/ke Bandara Soekarno Hatta untuk wilayah Bogor menjadi Rp 350.000 per sekali jalan sedangkan untuk wilayah Bekasi menjadi Rp 250.000 per sekali jalan.
- (4) Petty Cash. Penggunaan dana Petty Cash maksimum berubah dari Rp250.000 menjadi sebesar Rp 500.000
- (5) Penambahan Bab II: Prosedur Pengajuan dan Pelaporan Perjalanan Dinas, *Non Grant, Grants* dan *Special Account*.
- a. Dalam prosedur pengajuan dan pelaporan perjalanan dinas serta pengajuan permintaan dan pelaporan *Grants / Non Grants* sudah diatur kembali dalam Bab II.
  - b. *Special Account. Special Account* dibuat berdasarkan kesepakatan antara KEHATI dan MFP dimana penggunaannya dikhususkan untuk menyimpan dana Mitra yang sudah komit (*Approved*). Tujuan pembukaan rekening khusus ini untuk menjaga ketersediaan dana yang menjadi hak Mitra. Mekanisme pengiriman dana ke Mitra itu sendiri akan dilakukan melalui *Special Account* berdasarkan termin yang sudah disepakati di MoU.

Perbaikan SOP ini diharapkan akan memperlancar jalannya program dengan baik.

## BAGIAN III

### Kendala dan Penanganan Kendala Program

#### 3.1. Kendala

Kendala terbesar dalam pelaksanaan *capacity building* adalah penyelesaian penyusunan dan perbaikan kurikulum. Tahapan yang harus dilalui dalam penyelesaian kurikulum ini sangat panjang, karena sangat tergantung pada dua hal. *Pertama* adalah availabilitas pakar yang memahami dan telah terlibat dalam penyusunan kurikulum ini. *Expert* (pakar) yang terdiri atas Widya Iswara di Pusdiklat Kehutanan, MFP, dan LEI, serta beberapa pihak lain sangat sulit untuk dipertemukan dalam suatu waktu. *Kedua* adalah sistem di dalam Pusdiklat Kehutanan, yang memiliki standar acuan dan proses formal yang cukup panjang. Sedikit banyak hal ini menjadi kendala dalam percepatan penyelesaian kurikulum ini, sedangkan kebutuhan peningkatan kapasitas auditor dan para pihak pendukung SVLK yang lain amat mendesak. Kendala ini menjadi agenda yang diselesaikan dalam bulan Desember 2010.

Selain kendala lain dihadapi terkait penyusunan kurikulum, adalah liburan panjang akhir tahun. Beberapa mitra terhambat dalam penyelesaian perbaikan proposalnya, karena sebagian staf masih menjalani liburan akhir tahun. Ini memang sesuatu yang dapat dimaklumi dan dapat dipahami, meskipun sedikit banyak menjadi kendala dalam percepatan pelaksanaan aktivitas MFP.

Kendala dalam memfasilitasi proses negosiasi VPA adalah masih seputar membangun kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terhadap semua proses Negosiasi FLEGT/VPA. Kendala yang harus diantisipasi oleh MFP II adalah apabila di internal Kementerian Kehutanan tidak dipahami dan disepakati pada beberapa hal yang menjadi *critical points* dari text legal VPA. Hal ini beresiko pada proses kesepakatan dan persiapan penandatanganan dari Legal VPA.

Kendala lain yang berkaitan dengan membangun jejaring dalam penguatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam membangun *Independent Foret Monitoring* adalah pada level pengetahuan dan kapasitas membangun jejaring di daerah. Pekerjaan rumah bagi MFP II bagaimana meningkatkan pemahaman dan kapasitas CSOs sambil melakukan langsung proses monitoring dari implementasi SVLK yang sedang berjalan. Hal ini tidak mudah karena terkendala pada waktu dan kesiapan dari jaringan CSOs di daerah, sehingga semua proses harus dilakukan secara paralel.

## **1.1. Penanganan Kendala**

Dari kendala di atas, beberapa hal yang dilakukan oleh MFP II untuk menangani kendala dan mengantisipasi resiko yang dihadapi adalah:

1. PMU MFP II membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan PUSDIKLAT Kehutanan melalui series pembahasan bersama dan multipihak dalam membangun dan perbaikan kurikulum. Dalam proses ini, komunikasi dan transfer pengetahuan terjadi dan dapat mengurangi gap yang ada.
2. Internalisasi dari sunstansi kebijakan SVLK dilakukan melalui berbagai diskusi dan persiapan kurikulum, sehingga kendala yang berkaitan dengan penyusunan bahan-bahan peningkatan kapasitas dan dokumen negosiasi VPA menjadi cair.
3. PMU melakukan banyak persiapan dan diskusi dengan kunci-kunci SCOs yang bekerja dan paham dengan isi SVLK/VPA, sehingga jaringan untuk persiapan dan pengembangan IFM mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Kunci dari pengangan kendala program selama kurun ini adalah kerja tim PMU yang sangat kuat dengan komunikasi yang dibangun dengan cukup intens.

## **BAGIAN IV PENUTUP**

Demikian laporan ini disusun sebagai dokumen pertanggung-jawaban dari berjalannya program. Beberapa catatan penting dan lampiran besar dari laporan ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan:

- Sembilan (9) kurikulum dan silabus Pelatihan Peningkatan Kapasitas untuk implementasi SVLK, beserta bahan pelatihan. Ke sembilan dokumen ini telah di SK kan oleh Kelapa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, sebagai kurikulum resmi dari Kementerian Kehutanan.
- Bahan sosialisasi dan peningkatan pengetahuan pada pihak terhadap Sistem VLK yang telah dikembangkan oleh multipihak.
- Bahan promosi di dalam dan luar negeri bagi peningkatan pengetahuan Negara dan Konsumen di Uni Eropa, Jepang dan lainnya.
- Kajian-kajian dari Pasar Kayu Legal serta kajian aspek legal dari dokumen VPA, sebagai bahan dasar bagi pihak RI dalam proses negisoasi.
- Keseluruhan dokumen dari proses dan bahan negosiasi FLEG-T/VPA.

Keseluruhan dokumen tersebut dapat dilihat di website program ([www.mfp.or.id](http://www.mfp.or.id))  
Semoga bermanfaat.



Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia - KEHATI  
The Indonesian Biodiversity Foundation - IBF  
Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang  
Jakarta 12720, INDONESIA  
Tel. (62-21) 718 3185, 718 3185 Fax. (62-21) 719  
6131  
Website : [www.kehati.or.id](http://www.kehati.or.id)